

**Potensi Kerugian APBD Rp 50 M**

**TPP Pemprov Jateng Salahi Aturan**

**SEMARANG**—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian APBD 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar Rp50 miliar. Selain itu, pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 2014 kepada seluruh pegawai Pemprov Jateng dinilai menyalahi aturan.

Indikasi itu merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Tahun 2014 lalu mayoritas APBD kabupaten/kota di Jateng di atas Rp1 triliun. Sementara di Pemprov Jateng Rp16 triliun (lihat tabel).

“Indikasi kerugian daerah untuk pemerintah daerah se-Jateng Rp50 miliar, dana yang sudah disetorkan ke kas daerah

sebanyak Rp18 miliar,” kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo usai pertemuan dengan Badan Anggaran DPRD Jateng di Semarang kemarin.

Indikasi kerugian yang ditemukan di Pemprov Jateng, totalnya mencapai Rp2,8 miliar. Dana yang sudah disetorkan Rp2,5 miliar.

Ke Hal 7

**INDIKASI TEMUAN BPK**

Temuan BPK mengungkap adanya potensi kebocoran APBD Jateng dan 35 Kabupaten/Kota sebesar Rp50 miliar. Temuan lainnya, pemberian TPP Pemprov Jateng juga menyalahi aturan. Berikut jumlah APBD dan TPP Pemprov Jateng.

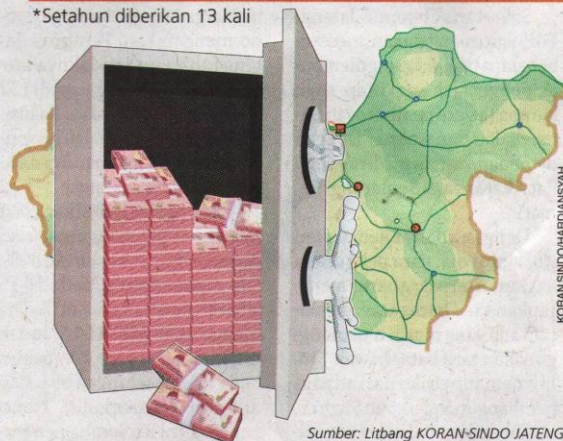
**APBD di Jawa Tengah**

Instansi	APBD 2014
Pemprov Jateng	Rp16.038.948.597.000
Kota Semarang	Rp3.596.046.384.292
Kendal	Rp1.739.904.983.520
Kota Salatiga	Rp905.738.400.000
Kabupaten Semarang	Rp1.635.740.846.000
Demak	Rp1.624.203.711.000
Kudus	Rp1.763.211.278.000
Jepara	Rp1.439.597.362.000
Rembang	Rp1.489.979.054.176
Grobogan	Rp1.788.253.908.250
Sragen	Rp1.573.100.497.000
Wonogiri	Rp1.623.950.413.510
Klaten	Rp2.111.155.450.848
Kota Surakarta	Rp1.672.123.718.732
Boyolali	Rp1.760.445.839.000
Kabupaten Magelang	Rp1.629.324.429.389
Kota Magelang	Rp775.333.908.000
Temanggung	Rp1.350.932.996.511
Purworejo	Rp1.612.092.183.654
Kebumen	Rp1.821.880.650.000
Banjarnegara	Rp1.448.721.187.000
Cilacap	Rp2.536.499.430.600
Kabupaten Tegal	Rp1.943.960.373.000
Kota Tegal	Rp2.041.790.414.000
Pemalang	Rp1.832.302.594.000
Kabupaten Pekalongan	Rp1.424.189.440.727
Batang	Rp1.326.555.291.781

**TPP Pegawai Pemprov Jateng**

Jabatan	Tunjangan
Sekretaris Daerah	Rp25.000.000
Asisten Sekda	Rp20.000.000
Eselon II	Rp15.000.000
Eselon III	Rp10.000.000
Eselon IV	Rp7.250.000
Golongan IV	Rp6.300.000
Golongan III	Rp5.250.000
Golongan II	Rp3.500.000
Golongan I	Rp3.000.000
Harlap Database	Rp 3.000.000

\*Setahun diberikan 13 kali



Sumber: Litbang KORAN-SINDO JATENG

(dari Hal 1

Kegiatan di Pemprov Jateng yang terindikasi mengakibatkan kerugian negara itu meliputi pembangunan fisik jalan yang volume bahannya tidak sesuai dengan kontrak dan lain sebagainya.

Menurut Hery, indikasi kerugian negara yang ditemukan BPK atas laporan hasil keuangan itu baru aspek administrasi. “Proses pemulihannya bisa diselesaikan secara administrasi, yakni menyerahkan kerugian negara ke kas daerah,” ucapnya.

Kegiatan-kegiatan yang merugikan keuangan daerah itu bisa diproses ke tindak pidana korupsi, kalau ada tindakan pidana, yakni adanya niat jahat dan perbuatan melawan hukum.

“Kalau ada silakan tindak lanjut temuan BPK ini, hanya ini bukan ranahnya BPK, tapi kewenangannya aparat penegak hukum,” paparnya,

Laporan hasil pemeriksaan BPK itu begitu masuk DPRD sudah menjadi barang publik. BPK hanya menyajikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah.

“Ini sudah *release*, siapa yang menghendaki untuk dijadikan bahan kerjanya ya silakan, termasuk aparat penegak hukum,” katanya.

Hery mengaku siap melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan keuangan APBD Pemprov Jateng itu bila ada permintaan dari DPRD Jateng. Laporan keuangan yang diperiksa itu baru sisi kulitnya. “Kalau ingin tahu lebih dalam akan kami lakukan pemeriksaan lagi,” tandasnya.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan berdasarkan rapat yang dilakukan BPK kemarin, BPK Jateng telah mengemukakan ada 33 temuan pada laporan APBD Pemprov Jateng 2014. “Dari jumlah itu ada 108 rekomendasi,” ujarnya.

Politikus PDIP itu meminta Pemprov Jateng menindaklanjuti setiap temuan yang dilaporkan oleh BPK.

“Temuan itu harus ditindaklanjuti, apa yang belum benar ditindaklanjuti dengan dibenarkan, kalau yang masih lemah perlu dikuatkan karena dampaknya untuk masyarakat,” kata dia. Kalau temuan BPK itu tidak ditindaklanjuti maka bisa terkena sanksi.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaskan siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan. “Nanti akan kami tindaklanjuti,” ucapnya.

● **amin fauzi**